

Pluralisme dan Multikulturalisme

Lusia Nurzalinda¹, Achmad Akmaluddin², Itryah³

Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bina Darma^{1,2,3}

Email : nurzalinda.lusia@gmail.com¹, achmad28akmaluddin0470@gmail.com², itryah@binadarma.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History

Submission:

Review:

Revised:

Accepted:

Published:

Keywords

Pluralisme

Multikulturalisme

Pancasila

Persatuan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep pluralisme dan multikulturalisme, implementasi, tantangan, serta upaya penguatannya dalam konteks sosial dan budaya. Pluralisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman, sementara multikulturalisme berfokus pada pengelolaan keberagaman secara harmonis dalam kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pluralisme dan multikulturalisme memiliki potensi menciptakan keharmonisan, tantangan seperti konflik identitas dan diskriminasi masih terjadi. Pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif berperan penting dalam memperkuat toleransi serta kesadaran akan keberagaman. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dan kebijakan yang berkelanjutan agar pluralisme dan multikulturalisme dapat memperkuat persatuan bangsa.

ABSTRACT

This study explores the concepts of pluralism and multiculturalism, their implementation, challenges, and efforts to strengthen them within social and cultural contexts. Pluralism emphasizes the recognition of diversity, while multiculturalism focuses on managing diversity harmoniously within public policies. This research employs a qualitative approach using literature study as the primary method. The findings indicate that while pluralism and multiculturalism have the potential to create harmony, challenges such as identity conflicts and discrimination persist. Multicultural education and inclusive policies play a crucial role in fostering tolerance and awareness of diversity. Therefore, collective commitment and sustainable policies are essential to ensure that pluralism and multiculturalism contribute to national unity.

Introduction

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, serta agama. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara

multikultural yang unik dan kompleks. Masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan sosial yang sangat beragam, baik dari segi etnis, adat istiadat, hingga orientasi politik. Keanekaragaman ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang plural. Pluralisme adalah pengakuan atas keberagaman yang ada, sedangkan multikulturalisme adalah kebijakan yang mendukung pengakuan tersebut dalam bentuk kebijakan dan praktik sosial yang nyata. Menurut Raymundus Sudhiarsa, mengutip pemikiran Will Kymlicka, multikulturalisme dapat dipahami sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki karakteristik serta tantangannya sendiri (Dewantara, dalam (Rozi, 2017)). Artinya, setiap kelompok budaya di Indonesia memiliki identitas serta dinamika sosial yang khas, sehingga interaksi antarbudaya harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Sebagai negara yang dikenal dengan pluralitasnya, Indonesia memiliki berbagai bentuk perbedaan yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi utama, yakni perbedaan horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal mencakup aspek sosial yang melekat pada identitas kelompok masyarakat, seperti suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan agama. Sementara itu, perbedaan vertikal lebih berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik yang mencerminkan adanya stratifikasi atau kesenjangan sosial dalam masyarakat (Rozi, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya beragam dalam hal budaya dan identitas, tetapi juga dalam hal akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Keberagaman yang begitu luas ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi perpecahan yang berujung pada konflik sosial.

Di sinilah peran penting Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu "Persatuan Indonesia." Sila ini tidak hanya menekankan pentingnya nasionalisme, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga harmoni di tengah perbedaan yang ada (Firmansyah et al., 2023). Persatuan menjadi elemen fundamental yang harus dijaga agar keberagaman tidak berubah menjadi faktor pemecah belah bangsa. Indonesia memiliki banyak potensi dari segi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dari Sabang hingga Merauke, negeri ini kaya akan pegunungan, lautan, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa (Ridhwan dalam(Firmansyah et al., 2023)). Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia sendiri juga memiliki kekayaan dalam aspek budaya, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan (Satar dalam(Firmansyah et al., 2023)). Semua aspek ini seharusnya menjadi kekuatan yang dapat memperkuat persatuan dan memperkuat solidaritas nasional. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi semboyan bangsa mencerminkan bagaimana keberagaman di Indonesia harus dipahami sebagai modal sosial yang dapat memperkuat identitas nasional (Lestari dalam(Firmansyah et al., 2023)).

Namun demikian, dalam realitasnya, keberagaman sering kali dijadikan alasan untuk memicu konflik sosial. Perbedaan etnis, agama, dan budaya tidak jarang menjadi

sumber diskriminasi, prasangka, serta pertikaian antar kelompok masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut dapat berujung pada tindakan ekstremisme dan radikalisme yang mengancam stabilitas nasional (Rado et al., (Firmansyah et al., 2023)). Banyak kasus konflik sosial yang terjadi di Indonesia berakar pada perbedaan identitas yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan ketegangan dan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan sosial yang muncul akibat perbedaan ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Bakri dalam (Firmansyah et al., 2023)).

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pluralisme menjadi konsep yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pluralisme bukan hanya sekadar pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga mendorong setiap individu untuk memahami, menghormati, serta bekerja sama dalam kerangka kebersamaan. Pluralisme mengajarkan pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif tanpa harus menghilangkan identitas budayanya masing-masing (Banke et al., 2023). Dengan adanya pluralisme, diharapkan masyarakat dapat hidup berdampingan dalam suasana yang damai, penuh keadilan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, kajian mengenai pluralisme dan multikulturalisme sangat penting. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat akan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan modal sosial yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa yang lebih maju dan berdaya saing. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif sila ketiga Pancasila akan memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data berasal dari buku, jurnal, dan laporan penelitian yang membahas pluralisme dan multikulturalisme, khususnya di Indonesia.

Results and Discussion

Konsep dan Implementasi Pluralisme dan Multikulturalisme

Pluralisme merupakan kondisi di mana terdapat keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, agama, maupun pandangan hidup. Istilah pluralisme sendiri

berasal dari kata "jamak", yang berarti menunjukkan adanya lebih dari satu unsur dalam suatu lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralisme diartikan sebagai keadaan masyarakat yang memiliki sistem sosial dan politik yang beragam (Banke et al., 2023).

Banke et al. (2023) menjelaskan bahwa pluralisme hadir dalam berbagai bentuk. Pertama, pluralisme budaya, yaitu pengakuan dan hidup berdampingannya beragam kelompok budaya dalam suatu masyarakat, di mana setiap kelompok tetap mempertahankan praktik budayanya masing-masing. Kedua, pluralisme agama, yang merujuk pada keberagaman agama dan praktik keagamaan yang hidup berdampingan di suatu komunitas. Indonesia sendiri mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Ketiga, pluralisme sosial, yang mengacu pada pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman kelompok sosial di masyarakat, baik dari sisi budaya maupun etnis. Pluralisme sosial menekankan pentingnya interaksi yang saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Keempat, pluralisme sains, yang berkaitan dengan keberadaan beragam pendekatan keilmuan dan teori dalam komunitas ilmiah. Meskipun belum sepenuhnya teruji, kebebasan intelektual ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, pluralisme media, yaitu keberagaman sumber informasi, baik media cetak maupun digital, yang menjadi sarana utama menyebarkan informasi dan menyampaikan beragam sudut pandang kepada masyarakat.

Sementara itu, multikulturalisme sering disamakan dengan pluralisme, meski sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Widowati (2022) menjelaskan bahwa multikulturalisme lebih menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Di sisi lain, pluralisme mencakup pengakuan terhadap keberagaman yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, agama, hingga pandangan hidup, serta menolak dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Di Indonesia, multikulturalisme lebih banyak membahas penerimaan terhadap keragaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi budaya, sementara pluralisme mencakup penerimaan terhadap perbedaan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep pluralisme dan multikulturalisme memiliki hubungan erat dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ghasa dalam (Firmansyah et al., 2023) menekankan bahwa sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Firmansyah (2023) juga menguraikan beberapa butir pengamalan sila ketiga yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan:

1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan tertentu demi menjaga keutuhan bangsa.
-

2. Bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara apabila dibutuhkan, di mana setiap warga negara diharapkan rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.
3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, yang dapat diwujudkan melalui tindakan nyata seperti melestarikan budaya, menjaga lingkungan, serta menggunakan dan mendukung produk dalam negeri.
4. Membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, sehingga rasa bangga sebagai warga negara dapat menjadi fondasi dalam memperkuat rasa persatuan.
5. Menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang berarti Indonesia tidak hanya menjaga kerukunan dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
6. Memperkuat persatuan Indonesia dengan berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menanamkan kesadaran bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan pandangan politik, mereka tetap satu kesatuan.
7. Meningkatkan interaksi sosial demi mempererat persatuan bangsa, dengan membangun komunikasi dan hubungan baik antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agar tercipta rasa saling memahami dan menghormati.

Selain itu, Sitepu dalam (Banke et al., 2023) menambahkan bahwa pengamalan sila ketiga juga mencakup mendahulukan kepentingan bangsa, mencintai produk dalam negeri, serta mendukung perdamaian dan keadilan sosial di tingkat global. Salah satu butir pengamalan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan pluralisme adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini menanamkan kesadaran bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan, dan di tengah perbedaan tersebut, masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan melalui sikap saling menghormati dan menghargai.

Dengan demikian, penerapan konsep pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia sangat bergantung pada pengamalan sila ketiga Pancasila. Keduanya bukan hanya sekadar upaya menerima keberagaman, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkokoh persatuan nasional, menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, serta membangun harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada.

Tantangan Pluralisme dan Multikulturalisme

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya titik temu berbagai budaya dan peradaban. Keanekaragaman ini merupakan sebuah anugerah yang diakui oleh dunia, namun di sisi lain, juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Seperti yang dikatakan oleh (Saputra et al., 2023), "Keragaman tersebut bagaikan pisau

bermata dua yang dapat menjadi anugerah bagi kita semua, namun di sisi lain juga dapat menjadi suatu tantangan." Tantangan ini semakin nyata dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pluralisme yang harmonis di Indonesia adalah konflik sosial berbasis agama. Kelompok garis keras agama seringkali melakukan tindakan intoleransi, seperti menyerang proses peribadatan umat lain hingga menyerang kelompok yang dianggap berbeda keyakinan. "Hal ini tentu mencederai konsep multikulturalisme yang ada di Indonesia" (Ayunda et al., 2022). Pasca reformasi 1998, konflik keagamaan menjadi salah satu konflik besar yang pernah melanda negeri ini, mencerminkan betapa rapuhnya toleransi antar umat beragama (Ayunda et al., 2022).

Selain konflik agama, keberagaman suku dan etnis juga menjadi sumber potensi konflik. Indonesia dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, serta norma yang berbeda-beda. "Masalah muncul ketika suku-suku ini harus berinteraksi satu sama lain" (Saripudin, Diah Erna Wati, 2023). Perbedaan cara pandang dan nilai-nilai kultural yang dipegang masing-masing suku seringkali menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik antar etnis.

Tantangan lainnya datang dari keberagaman ras di Indonesia. Kehadiran masyarakat keturunan asing, seperti Arab, India, Persia, dan Cina, turut memperkaya keragaman sosial. Namun, ketimpangan ekonomi yang diwarnai dominasi kelompok tertentu, seperti keturunan Cina yang mendominasi sektor ekonomi, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu konflik horizontal (Saripudin, Diah Erna Wati, 2023).

Dalam konteks kebebasan berpendapat, ruang publik di Indonesia masih belum sepenuhnya menjadi wadah yang aman bagi semua suara. "Sebagian orang jarang mengemukakan pendapatnya dengan bebas sesuai hak yang dimilikinya terutama kebebasan berbicara di ruang publik". Ruang publik yang seharusnya menjadi arena diskusi justru kerap berubah menjadi ruang konflik. Situasi ini diperburuk dengan terbatasnya kebebasan pers yang seharusnya berperan dalam mengungkap kebenaran dan meredam konflik. "Masih dibatasinya aktivitas pers sehingga hilangnya kebebasan pers sebagai salah satu bentuk perwujudan bahwa pers ikut andil dalam penyelesaian konflik". Bahkan, pemberitaan yang tidak bijak dan provokatif justru memperbesar konflik yang ada (Ayunda et al., 2022).

Diskriminasi dalam kebebasan berserikat juga menjadi tantangan tersendiri. "Diskriminasi terhadap seseorang atas dasar faktor keberagaman atau perbedaan sebenarnya tidak sesuai dengan hak kewarganegaraan yang dipunyai rakyat Indonesia"

(Ayunda, 2022). Ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan multikulturalisme belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, lemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila turut memperparah tantangan pluralisme. Risladiba (2023) menekankan bahwa "bentuk multikulturalisme harus cair dalam kelompoknya juga adanya kebebasan untuk berafiliasi serta adanya konsepsi identitas kelompok harus non eksklusif." Sayangnya, nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan dalam keberagaman masih belum tertanam kuat di seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan berupa ketegangan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan suku. "Tanpa adanya saling menghormati dan menghargai, ketegangan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial, perpecahan politik, bahkan kekerasan fisik" (Banke et al., 2023). Tantangan ini semakin berat mengingat ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif bagi semua kelompok (Banke et al., 2023).

Dominasi kelompok mayoritas dalam wacana publik, kebijakan, hingga akses sumber daya juga mencederai semangat pluralisme. Padahal, idealnya pluralisme mendorong pengakuan setara terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa dominasi satu kelompok atas yang lain. Minimnya dialog antarbudaya dan antaragama pun semakin memperlebar jarak antar kelompok masyarakat. "Minimnya ruang komunikasi yang sehat berpotensi memperkuat prasangka dan stereotip antar kelompok" (Banke et al., 2023).

Arus globalisasi yang disertai masuknya paham-paham radikal serta pengaruh konflik internasional turut memperumit upaya membangun kesepahaman di tingkat lokal. "Isu-isu global ini memperumit upaya membangun kesepahaman dan toleransi di tingkat lokal". Sayangnya, sistem pendidikan pun belum maksimal dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan persatuan. "Generasi muda kurang memiliki kesadaran pluralisme, toleransi, dan semangat persatuan" (Banke et al., 2023).

Dari seluruh tantangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia membutuhkan perhatian dan upaya serius. Keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa harus dijaga melalui pendidikan multikultural yang efektif, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta penciptaan ruang dialog yang sehat. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat merawat keberagamannya dan mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya Penguatan Pluralisme dan Multikulturalisme

Penguatan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjaga keutuhan bangsa yang kaya akan keberagaman. Salah satu upaya mendasar adalah menanamkan toleransi sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi mengajarkan setiap individu untuk menghormati dan menghargai perbedaan, serta memberikan ruang bagi kelompok lain menjalankan hak-hak dan keyakinannya tanpa diskriminasi (Ridwan Effendi dkk., dalam (Nabilah et al., 2024)). Dengan memperkuat sikap toleran, masyarakat akan lebih siap menghadapi perbedaan budaya, agama, ras, etnis, maupun bahasa sebagai realitas yang harus diterima, bukan dihindari atau dipertentangkan.

Upaya ini perlu diintegrasikan melalui pendidikan multikultural, yang mengadopsi konsep pluralisme serta menekankan pentingnya kesetaraan di tengah keberagaman. Pendidikan multikultural mendorong peserta didik memahami bahwa perbedaan bukan sumber konflik, melainkan kekayaan yang memperkaya identitas bangsa. Dalam perspektif pendidikan multikultural, isu-isu terkait SARA bukan dilihat sebagai masalah, melainkan sebagai bagian dari keragaman yang harus dikelola dengan bijaksana (Ridwan Effendi dkk., dalam (Nabilah et al., 2024)). Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran dan sikap inklusif terhadap kelompok yang berbeda.

Untuk mewujudkan pendidikan multikultural yang efektif, perlu diterapkan beberapa strategi, seperti memperkenalkan konsep toleransi sejak dini dalam pembelajaran, melibatkan siswa dalam dialog lintas budaya, mendorong kepedulian sosial, serta membuka wawasan peserta didik agar tidak terjebak dalam pola pikir sempit yang hanya memperkuat pandangan kelompoknya sendiri (Ridwan Effendi dkk., dalam (Nabilah et al., 2024)). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan H.A.R. Tilaar yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural berperan penting dalam meredam potensi konflik di tengah masyarakat yang heterogen (Wales dalam (Nabilah et al., 2024)).

Lebih dari itu, pendidikan multikultural juga berfungsi mengajarkan peserta didik untuk menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan hidup berbangsa. Semboyan ini menegaskan bahwa meskipun rakyat Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam, mereka memiliki tujuan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wales dalam (Nabilah et al., 2024)). Dengan demikian, nilai kebhinnekaan harus terus dipelihara agar keberagaman yang ada tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan kekuatan pemersatu.

Selain melalui pendidikan, penguatan pluralisme juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu yang tetap dibatasi oleh kepentingan bersama. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, pluralisme dapat dijadikan sebagai landasan filosofis yang menekankan pentingnya membangun harmoni dan menjaga kebebasan beragama secara setara. Dengan memahami dan menginternalisasi konsep pluralisme, masyarakat diharapkan mampu mengelola perbedaan keyakinan secara lebih bijak dan menjadikannya sebagai fondasi kerukunan antar umat beragama (Masduki, 2016).

Di sisi lain, pendidikan multikultural memiliki fungsi strategis sebagai sarana alternatif penyelesaian konflik yang bersumber dari perbedaan identitas. Melalui pendidikan ini, peserta didik tidak hanya dikenalkan pada akar budaya dan karakter bangsa, tetapi juga didorong memahami nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang relevan dengan kondisi Indonesia (Suparlan dalam (Saputra et al., 2022)). Penguatan sikap multikultural dan pluralisme juga perlu didukung oleh lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan ruang sosial utama bagi anak bangsa untuk berinteraksi, bertukar informasi, serta membangun kesadaran dan penghormatan terhadap keberagaman (Assingkily & Mikyal dalam (Firmansyah et al., 2023)).

Dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan formal serta memperkuatnya melalui lingkungan sosial, penguatan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi kunci penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Conclusion

Pluralisme dan multikulturalisme merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam, terutama di Indonesia. Pluralisme tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menekankan pentingnya interaksi yang saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Sementara itu, multikulturalisme berfokus pada penerimaan serta penghargaan terhadap perbedaan budaya dalam suatu masyarakat.

Dalam implementasinya, pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia sangat berkaitan dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun persatuan nasional. Namun, penerapan pluralisme dan multikulturalisme masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik berbasis agama, etnis, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai

Pancasila dan minimnya ruang komunikasi yang sehat turut memperparah kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan nilai pluralisme dan multikulturalisme melalui pendidikan multikultural yang efektif. Pendidikan ini harus diintegrasikan dalam sistem pembelajaran formal serta didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Selain itu, pembangunan ruang dialog yang inklusif dan adil juga menjadi kunci dalam mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya toleransi dan persatuan. Dengan demikian, menjaga keberagaman melalui pendekatan pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial, tetapi juga menjadi strategi utama dalam memperkokoh persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

References

- Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Salekhah, S., Widyani, N., & H, A. R. (2022). Tantangan Multikulturalisme di Indonesia : Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik. 2, 1–18.
- Banke, Ri., Steven, & Susanto, N. (2023). Pancasila Sebagai Solusi Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 8(2), 188–127.
- Firmansyah, Y., Suparman, T., & Safiah, T. L. (2023). Multikulturalisme dan pluralisme dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (pengamalan sila ketiga Pancasila). *Pendes : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 4547–4558.
- Masduki, H. (2016). *Pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif kerukunan antar umat beragama*. 9(1), 15–23.
- Nabilah, Z., Hudi, I., Bella, S., Doni, S. N., & Azhara, S. C. (2024). *Tantangan Multikulturalisme Terhadap Solidaritas Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Majemuk*. 2, 82–89.
- Rozi, M. F. (2017). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani: Kajian Pragmatik. *Al-Ibrah*, 2(2), 104–127.
- Saputra, A. G., Juliansyah, S. C., & Athayla, S. (2023). Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme: Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 573–580.
- Saputra, A. G., Maryati, A., Uin,), & Yunus Batusangkar, M. (2022). Urgensi Penerapan Pancasila Pada Pendidikan Karakter. *National Conference on Social Science and Religion, Ncssr*, 31–36.
- Saripudin, Diah Erna Wati, E. S. (2023). Multikultural di Era Modern: Wujud Komunikasi Lintas Budaya. *Jurnal Budimas*, 13(1), 104–116.
-